



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

JalanSutanSyahrir No. 42 / Fax. 21200, 25224

PANGKALAN BUN 74112

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada Yth. : Kepala Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat
Dari : Kepala Bidang Pembangunan dan Pemerintahan Desa
Tembusan : -
Tanggal : 20 Juli 2020
Nomor : 414.2/ 33 /DPMD.E-PPD/VII/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Lembar Ceklist BLT DD
Hal : Laporan Perjalanan Dinas Monitoring Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dan Rekonsiliasi Data Realisasi Pelaksanaan APBDes Sampai Dengan 30 Juni 2020 (Semester I) Kecamatan Pangkalan Banteng.

I. PENDAHULUAN

A. Umum/Latar Belakang

1. Sebagai upaya dalam pencegahan kesalahan administrasi dalam penyaluran BLT DD , maka diperlukan pengecekan administrasi dan kelengkapan dokumen BLT DD untuk masing-masing Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Perlu adanya sinkronisasi data antara Aplikasi Siskeudes dengan data pendukung yang ada terutama rekening koran demi menghasilkan Laporan Semester I yang teruji.

B. Landasan Hukum

1. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 1 tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. DPA SKPD Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 900/18/II/DPA.SKPD/2020 Tanggal 30 Desember 2019.
3. Persetujuan Kepala Dinas PMD Kotawaringin Barat tanggal 30 Juni 2020 perihal melaksanakan Monitoring Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dan Rekonsiliasi Data Realisasi Pelaksanaan APBDes Sampai Dengan 30 Juni 2020.
4. Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 841.5/119/DPMD.A/VII/2020 Tanggal 24 Februari 2020 perihal Melaksanakan Perjalanan Dinas Monitoring Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dan Rekonsiliasi Data Realisasi Pelaksanaan APBDes Sampai Dengan 30 Juni 2020 (Semester I) Kecamatan Pangkalan Banteng.

C. Maksud dan Tujuan :

1. Melakukan pengecekan administrasi BLT DD sampai dengan tanggal 30 Juni 2020.
2. Melakukan Rekonsiliasi Keuangan Desa melalui Aplikasi Siskeudes sampai dengan tanggal 30 Juni 2020.
3. Mendapatkan data angka yang valid untuk laporan Keuangan Semester I Tahun 2020
4. Untuk memberikan pembinaan dan memberikan solusi atas permasalahan yang ada dalam Penatausahaan Keuangan Desa.

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Desa yang dilakukan pengecekan adalah seluruh Desa di Kecamatan Pangkalan Banteng.
2. Rekonsiliasi Data Keuangan dari Siskeudes dengan rekening Koran sampai dengan 30 Juni 2020.
3. Pengecekan SPJ dan berkas pendukung terkait BLT DD 2020 sampai dengan yang terakhir dilaksanakan.
4. Tanya jawab penatausahaan keuangan Desa dan perbaikan aplikasi Siskeudes 2020.
5. Menyampaikan petunjuk penyusunan Laporan Semester I Tahun 2020

III. KEGIATAN YANG DISTEMPEL

1. Pelaksanaan Rekon:

- Masih ada Desa yang mengalami trouble dalam penggunaan aplikasi Siskeudes karena adanya pergantian Operator siskeudes, pergantian Laptop, maupun karena faktor lain dari laptop (virus dll).
- Hampir semua Desa lupa cara dan teknik dalam melaksanakan penatusahaan menggunakan Aplikasi Siskeudes termasuk pelaporannya.
- Masih banyak ditemukan pola pengelolaan keuangan yang tidak sesuai dengan realisasi di lapangan, misalnya penggunaan SPP Defenitif dan SPP Panjar.
- Disampaikan agar operator Siskeudes lebih mendalami teknik pengelolaan keuangan Desa menggunakan aplikasi Siskeudes, dan juga Kaur Keungan lebih disiplin dalam menerapkan penatausahaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku.

2. Pelaksanaan Pengecekan Administrasi BLT DD

- Ditemukan penyaluran di luar pengesahan, karena ada perubahan data yg belum melalui musdesus.
- Ada beberapa Desa yang belum memiliki Berita acara atau surat pernyataan yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan menolak atau tidak menerima BLT DD.
- Ada beberapa Desa yang Tanda penerimanya masih diragukan keasliannya (palsu) karena mungkin kendala teknis yg ada dilapangan (belum ketemu orangnya dsb).

IV. KESIMPULAN

A. Kesimpulan :

1. Untuk penatausahaan berbasis aplikasi Siskeudes, sering kali digunakan hanya untuk pencairan (menghasilkan SPP) selebihnya belum dilakukan penginputan.
2. Permasalahan yang disampaikan di point 1 diatas, membuat hasil laporan tidak bisa *up to date* (*sesuai waktu*) dan lupa untuk melanjutkan proses yang ada.
3. Penyaluran BLT DD menimbulkan permasalahan administrasi yang harus segera diperbaiki agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

B. Saran :

1. Menghimbau Kepala Desa untuk tidak merubah Operator yang sudah menguasai Aplikasi Siskeudes, walaupun terjadi harus ada transfer ilmu terlebih dahulu.
2. Menghimbau kecamatan agar meningkatkan kapasitas pendampingan di wilayah masing-masing, terutam penatausahaan Keuangan melalui aplikasi Siskeudes.
3. Monitoring berkala adalah solusi untuk pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan keuangan desa baik karena kesengajaan maupun ketidakpahaman regulasi.
4. Membuat Siskeudes menjadi online adalah salah satu alternatif untuk mengontrol pengelolaan keuangan Desa demi mencegah kesalahan-kesalahan dalam penggunaan Aplikasi dan intervensi secara langsung tentang kepatuhan terhadap regulasi yang ada

V. PENUTUP

Demikian laporan Perjalanan Dinas ini disampaikan untuk diketahui dan sebagai bahan lebih lanjut. Terima Kasih

Yang Melapor :

1. **ELPRAMIT CULASE, M.Si**
NIP. 19800315 200312 1 008

2. **K. SUBETA RDA, SE**
NIP. 19840913 201001 1 011

3. **AGUSTINE E. BINTI, ST**
NIP. 19730819 201406 2 004

4. **M. FAKHRUL HADI**
NIP. 19830211 200312 1 003



LAPORAN REKONSILIASI BLT DD

NO	DESA	KELENGKAPAN MUSDES PENETAPAN HASIL PENDATAAN	SK CAMAT PENGESEHAN KPM BLT + LAMPIRAN DAFTAR NAMA	PERKADES KPM BLT + LAMPIRAN DAFTAR NAMA	SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)	KWITANSI PEMBAYARAN	DAFTAR PENERIMAAN BLT	SURAT PERYATAAN ATAU BERITA PEMBATALAN PENERIMA BLT	DOKUMENTASI	LAPORAN PELAKSANAAN BLT DD (PMK 40)	KETERANGAN
KECAMATAN PANGKALAN BANTENG											
5.	Pangkalan Banteng	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tidak Lengkap	✓	Tidak Ada	SP atau Berita Acara tdk dibuatkan
6.	Mulya Jadi	✓	✓	✓	Tidak Ada	Tidak Ada	✓	Tidak Lengkap	✓	Tidak Ada	SPP dan Kuitansi tidak dibawa
7.	Karang Mulya	✓	✓	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	✓	Tidak Lengkap	Tidak Ada	Tidak Ada	Berkas tidak dibawa
8.	Kebun Agung	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	✓	Tidak Lengkap	Berkas tidak dibawa
9.	Sidomulyo	✓	✓	✓	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	✓	✓	✓	Tidak Ada	SPP dan Kuitansi tidak dibawa
10.	Marga Mulya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tidak Ada	✓	Tidak Ada	
11.	Amin Jaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12.	Arga Mulya	Tidak Lengkap	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13.	Natni Kerbau	✓	✓	Tidak Lengkap	✓	✓	✓	✓	✓	Tidak Ada	
14.	Simpang Berambai	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tidak Ada	✓	Tidak Ada	Perkades tidak ada daftar nama Tidak ada pembatalan
15.	Sungai Hipay	Tidak Lengkap	✓	✓	✓	Tidak Lengkap	✓	Tidak Lengkap	✓	Tidak Ada	
16.	Sungai Pakit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tidak Ada	✓	Tidak Ada	
17.	Berambai Makmur	Tidak Lengkap	✓	✓	Tidak Ada	Tidak Ada	✓	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	SPP dan Kuitansi tidak dibawa
18.	Karang Sari	Tidak Ada	Tidak Lengkap	✓	Tidak Ada	Tidak Ada	✓	Tidak Ada	✓	Tidak Ada	SPP dan Kuitansi tidak dibawa
19.	Sungai Melau	Tidak Ada	✓	✓	Tidak Ada	Tidak Ada	✓	Tidak Ada	✓	Tidak Ada	SPP dan Kuitansi tidak dibawa
20.	Sungai Bengkuang	Tidak Lengkap	✓	✓	✓	✓	✓	Tidak Ada	✓	Tidak Ada	
21.	Sungai Kuning	Tidak Ada	✓	✓	✓	✓	✓	Tidak Ada	✓	Tidak Ada	